

## ABSTRAK

Kebutuhan pangan penduduk Indonesia yang utama adalah beras. Seiring dengan pertumbuhan penduduk kebutuhan beras juga mengalami peningkatan. Pupuk dan beras adalah dua komoditi pokok dalam sistem ketahanan pangan nasional. Pupuk digunakan petani untuk meningkatkan produksi gabah mereka. Kekurangan penggunaan pupuk mengakibatkan produksi gabah petani menurun. Dengan demikian kebutuhan akan pupuk adalah hal yang utama bagi petani. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut pemerintah memberikan pupuk subsidi, yaitu pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat pengecer resmi. Tujuannya adalah membantu petani agar dapat membeli pupuk sesuai kebutuhan serta harga yang lebih murah, sehingga produktivitas dan pendapatan petani meningkat.

Kantor Pusat Pemasaran (KPP) PT. Pupuk Kaltim di Surabaya merupakan kantor pemasaran PT. Pupuk Kaltim yang didirikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pupuk para petani, khususnya wilayah timur Indonesia. KPP ini terletak di Genteng Kali No. 55-57 Surabaya.

Penelitian yang dilakukan merupakan *applied research*. Peneliti menemukan permasalahan terkait sistem informasi manajemen sediaan dan memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi badan usaha. Jenis data yang diperoleh adalah data kualitatif dan kuantitatif. Metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.

KPP Jatim selama ini memiliki permasalahan pada sistem informasi manajemen sediaan. Dokumen-dokumen terkait dengan aktivitas operasional perusahaan sudah lengkap namun karyawan yang ada di KPP Jatim tidak melakukan *Job descreaption* dengan benar. Hal ini terlihat dari update pendistribusian pupuk urea subsidi ke pengecer/kios yang seharusnya dilakukan oleh bagian penjualan tidak dilakukan, padahal hasil laporan tersebut akan dijadikan dasar penggantian subsidi oleh pemerintah. Otorisasi dokumen DO, Faktur, dan SPAP yang seharusnya diotorisasi oleh kepala pemasaran tidak dilakukan. KPP Jatim juga melakukan penjualan pupuk subsidi kepada distributor illegal sehingga mengakibatkan kelangkaan pupuk di tingkat petani. Berdasarkan temuan-temuan tersebut terlihat bahwa karyawan yang ada di KPP Jatim tidak menjalankan prosedur yang ada, hal ini dapat mengganggu kegiatan operasional perusahaan bahkan mengakibatkan kerugian. Untuk itu dibutuhkan pengendalian internal agar KPP Jatim dapat menerapkan sistem informasi manajemen sediaan dengan benar sehingga dapat mengoptimalisasikan sistem distribusi.